KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Polri .....

Dari Halaman 1

seorang anggota Polri dalam kasus tersebut. Dia mengatakan pemeriksaan berjalan baik, dan Polda Sumut mendukung langkah yang dilakukan KPK.

Namun Budi tidak menjelaskan jati diri polisi yang telah diperiksa dan apakah pemeriksaan anggota Polri itu berkaitan dengan kabar seorang Kapolres di wilayah Sumut ikut terjaring OTT. Kabar itu kemudian dibantah oleh KPK.

Penyidik KPK tengah mendalami proyek-proyek yang dikerjakan oleh tersangka sekaligus Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi (KIR).

"Penyidik menemukan adanya petunjuk-petunjuk terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh tersangka KIR di beberapa kabupaten ataupun kota lainnya. Itu yang kemudian penyidik terus lakukan penelusuran," katanya.

Pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Dirut PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi (KIR), dan Direktur PT Rona Na Mora M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).

Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp 231,8 miliar.

Untuk peran para tersangka, KPK menduga M. Akhirun Efendi dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.

Batal Periksa Jaksa

Sebelumnya KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Muhammad Iqbal pada Jumat, 18 Juli 2025. Iqbal dipanggil terkait dengan kasus suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Namun, Kajari Mandailing Natal itu tak memenuhi panggilan KPK. Juru bicara Budi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk memanggil Iqbal lagi.

"Saat ini masih dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kejaksaan dan berlangsung baik," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 21 Juli 2025. KPK mengatakan pihaknya sudah bersurat kepada Kejagung ihwal permintaan izin pemeriksaan saksi kepada Iqbal.

Kejaksaan Agung minta KPK mengikuti prosedur yang berlaku di Kejaksaan Agung jika akan memeriksa jaksa.

"Lakukan saja sesuai mekanisme yang ada. Pemanggilan ketika dia melaksanakan tugas ada aturan kami, sudah dilalui nggak?," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Selasa, 22 Juli 2025. Saat ditanya apakah KPK harus bersurat kepada Jaksa Agung, ia menjawab, "Harus dong, semua ada etika ada aturannya," ujarnya.

Dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tertanggal 6 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin diatur bahwa, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana harus atas izin Jaksa Agung.**(tem/js)**

Jokowi Diperiksa Selama 3 Jam .....

Dari Halaman 1

sedang berada di Solo.

"Yang pasti di hari Senin kami mendengar penyidikan dilakukan di Polres Solo itu ada delapan saksi," kata dia, seraya menyatakan, Jokowi diperiksa bersama sembilan saksi lain.

"Yang pasti Bapak memenuhi panggilan pemberian keterangan ini bersama dengan saksi-saksi lain yang memang sedang dilakukan penyidikan di area Solo," kata Firmanto.

Dalam pemeriksaan itu, Jokowi juga membawa dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan penyidik untuk mengusut kasus tersebut.

"Antara lain dokumen-dokumen ijazah dari mulai SD, SMP, SMA dan S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada," kata dia.

45 Pertanyaan

Joko Widodo menjawab 45 pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu mengatakan dari 35 pertanyaan merupakan sudah pernah dijawab Jokowi saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Sisanya, 10 pertanyaan merupakan pertanyaan baru.

"Dan yang baru semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya," kata Jokowi usai pemeriksaan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan penyidik menanyakan tentang Dian Sandi Utama, kader PSI yang mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial.

Penyidik menanyakan apakah Jokowi meminta Dian Sandi untuk mengunggah gambar tersebut.

Jokowi pertama kali bertemu saat Dian Sandi berkunjung ke kediamannya untuk meminta maaf karena telah mengunggah foto ijazahnya.

"Yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya," kata dia.

Selain soal Dian Sandi, Jokowi juga dikonfirmasi soal Kasmujo. Jokowi memastikan Kasmujo adalah dosen pembimbingnya saat menjalani studi di Fakultas Kehutanan UGM.

"Memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Prof. Dr. Ir. Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja," kata dia.

Jokowi juga menyebut ijazahnya kini disita oleh penyidik untuk diperiksa lebih jauh.

"Iya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA," kata dia.**(cnn/js)**

Ijazah SMA dan Sarjana Disita Polisi .....

Dari Halaman 1

pertanyaan terkait dengan laporan dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu.

"Fokusnya tetap sama, pendalaman pendalaman, mengenai KKN beliau, pembimbing, diperdalam lah," ujarnya.

Yakup mengaku belum mendapat informasi apakah sudah ada tersangka dalam kasus dugaan fitnah ini. Menurutnya, proses penyidikan masih berlangsung.

"Pemeriksaan selanjutnya kami menghormati dan menunggu, kami sudah sampaikan, kami siap, pak Jokowi selaku taat hukum pasti akan hadir," katanya.

Sebelumnya Jokowi membawa ijazah aslinya saat memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilaksanakan di Mapolresta Surakarta, Rabu (23/7).

Kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana mengatakan Jokowi datang membawa dokumen yang dianggap relevan dengan kasus tersebut.

"Bapak juga membawa dokumen-dokumen termasuk ijazah asli Bapak yang nanti akan diserahkan akan disampaikan kepada penyidik," kata Firmanto.

Jokowi tiba di Markas Polresta (Mapolresta) Solo untuk diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jokowi tiba sekitar pukul 10.16 WIB mengenakan kemeja putih celana hitam.

Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu tidak berbicara banyak kepada awak media. Jokowi hanya melempar senyum dan memilih langsung masuk ke Gedung Mapolresta Surakarta.**(cnni/js)**

44 Orang Jadi Tersangka .....

Dari Halaman 1

Penetapan puluhan tersangka itu berdasarkan penindakan yang dilakukan Satgas Penegakan Hukum atas 35 kejadian dilaporkan.

"Sudah ada penegakan hukum yang berjalan, ada 44 orang tersangka. Semoga ini bisa menjadi efek jera bagi masyarakat dan menghentikan kegiatan membakar," kata Suharyanto dalam keterangannya, Rabu (23/7).

Suharyanto menyebut kebakaran hutan dan lahan ini lebih banyak dipicu oleh manusia, khususnya untuk membuka lahan dengan cara dibakar.

"Ini bukan hanya dari alam, tapi ulah dari manusia. Titik api bukan dari kekeringan, tapi manusia yang bakar," ucap dia.

"Kami bertahun-tahun melihat kebakaran, terlihat betul ini perbuatan ulah manusia. Kita sepakat, ini jangan terus dibiarkan dan berkelanjutan," imbuhnya.

Karenanya, Suharyanto pun mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia juga meminta masyarakat melapor jika ada indikasi atau melihat orang yang akan membakar lahan kepada aparat setempat.

"Segera melapor ke TNI/Polri dan aparat desa, jika ada yang membuka lahan dengan membakar," ujarnya.

Di sisi lain, Suharyanto menyebut hotspot atau titik panas sudah mulai berkurang sejak operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan sejak kemarin Senin (21/7).

Pemadaman kebakaran melalui OMC merupakan salah satu cara tepat untuk memadamkan api, apalagi dengan jenis lahan yang terdiri dari lahan gambut yang memungkinkan api di atas tanah sudah padam, namun di dalam tanah masih ada bagian yang terbakar.

"OMC ketika untuk memadamkan karhutla, sangat efektif karena area kebakaran yang luas dengan mendatangkan hujan akan cepat padam. Apalagi lahan gambut harus dibasahi terus," tutur Suharyanto.

Selain itu akan dilakukan penambahan personel darat yang dilengkapi dengan alat pemadaman di empat wilayah yang diprioritaskan.

"Menambah Satgas darat dengan perbantuan dari Polres dan Kodim masing - masing 100 personel. Pada wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai," kata Suharyanto.

"Bertugas memperkuat operasi pemadaman selama satu bulan. Jika api padam tugasnya melakukan patroli di titik-titik yang kemungkinan ada orang membakar dan mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar," imbuhnya.**(cnni/js)**

Prabowo Resmi Luncurkan Tema dan Logo .....

Dari Halaman 1

luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Indonesia," tandas dia.

"Bismillah secara resmi saya luncukan," kata Prabowo di acara peluncuran logo dan tema HUT ke-80 RI.

"Pemerintah menetapkan tema hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini adalah 'bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju'" imbuhnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, peluncuran logo ini sekaligus juga menandakan dimulainya rangkaian acara perayaan HUT ke-80 RI.

Pantauan wartawan, Prabowo duduk di bagian depan bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamudin, dan Ketua MA Sunarto.

Hadir juga sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Istana. Mereka antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono.

Lalu Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menkomdigi Meutya Hafid, Menlu Sugiono, hingga Kepala PCO Hasan Nasbi.

Logo HUT ke-80 RI bisa dilihat dan didownload di sini, https://hut80ri.setneg.go.id/.**(cnni/js)**

Iran Siap Perang Lagi .....

Dari Halaman 1

agresi lagi ke Teheran.

Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera pada Rabu (23/7), Pezeshkian menyatakan Iran sedang dalam siaga penuh untuk kemungkinan perang lanjutan dengan Israel. Iran dan Israel saat ini sedang gencatan senjata usai kedua negara berperang selama 12 hari Juni lalu.

"Kami sangat siap untuk langkah militer apa pun yang diluncurkan Israel. Angkatan bersenjata kami siap untuk menyerang jauh ke dalam Israel lagi," kata Pezeshkian.

Menurut Pezeshkian, gencatan senjata antara negaranya dengan Israel tak akan mungkin berlangsung lama. Sebab Israel merupakan negara yang terus melakukan pelanggaran.

"Karena itu kami mempersiapkan diri untuk berbagai skenario dan potensi respons. Israel telah menyakiti kami, yang kami balas dengan menyakiti mereka. Mereka membombardir kami, dan kami balas dengan serangan yang amat menyakitkan. Namun, mereka menyembunyikan fatalitasnya," ucap Pezeshkian.

Dalam kesempatan itu, Pezeshkian juga kembali menyuarakan klaim Iran bahwa Israel berniat menggulingkan rezim Teheran, dengan serangannya yang menargetkan para pejabat militer dan ilmuwan nuklir.

"Mereka benar-benar gagal melakukannya," kata Pezeshkian.

Perang Israel dan Iran yang pecah pada 13 Juni lalu telah menewaskan lebih dari 900 orang di Iran dan sedikitnya 28 orang di Israel.

Israel berusaha menyerang habis-habisan fasilitas nuklir Iran, meski akhirnya tak berhasil dan meminta bantuan Amerika Serikat. AS yang awalnya dilaporkan tak mau, ujung-ujungnya ikut menyerang Iran.

Tiga situs nuklir utama Iran pun diklaim hancur total.

Amerika Serikat kemudian mendesak Iran dan Israel gencatan senjata usai pangkalannya di Qatar diserang Iran. Kedua negara pun sepakat meletakkan senjata pada 24 Juni lalu.**(cnni/js)**

1 dari 7 Anak RI Jadi Korban Perundungan .....

Dari Halaman 1

tahun 2024, menunjukkan bahwa 1 dari 7 anak di Indonesia pernah mengalami perundungan melalui cyber," kata Arifah dalam Konferensi Pers Hari Anak Nasional yang digelar di Gedung KemenPPPA, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).

Selain perundungan, Arifah juga mengungkap berbagai risiko digital lain yang mengintai anak-anak Indonesia. Ia menyebutkan bahwa 4 dari 100 anak pernah menjadi korban kekerasan seksual daring, sementara 25 persen anak menerima pesan bermuatan seksual, dan 50 persen anak mengaku pernah melihat konten seksual di media sosial.

Meski berbagai ancaman tersebut sudah mengemuka, baru 37 persen anak yang menerima edukasi keamanan digital, menurut data yang dikumpulkan Kementerian PPPA.

"Jadi hari ini anak kita sedang menjelajahi ruang maya tanpa perlindungan yang cukup. Atau bahkan sering kali tanpa pendampingan," tegas Arifah.

Arifah juga menyoroti tingginya angka anak usia dini yang sudah terekspos dunia digital, berdasarkan data BPS 2024. Berikut catatannya:

- 35 persen anak usia 1-5 tahun telah menggunakan gadget dan terhubung ke internet,
- 78 persen anak usia 5-6 tahun menggunakan gadget,
- 35 persen diantaranya juga sudah terkoneksi internet.

Ia mengingatkan, meski ruang digital memberi kesempatan belajar dan bersosialisasi, ancaman terhadap keselamatan serta perkembangan karakter anak juga sangat nyata.

Peringatan Hari Anak Nasional 2025 mengusung tema "Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045". Tema ini, menurut Arifah, sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029, khususnya dalam agenda pembangunan sumber daya manusia.

Menteri PPPA pun mengajak semua pihak, termasuk orang tua, guru, hingga pengambil kebijakan, untuk aktif mendampingi anak-anak dalam aktivitas digital mereka..**(cnni/js)**

Ketika APH .....

Dari Halaman 1

Anggaran yang semula digadang-gadang "efisien" dan "partisipatif" itu tiba-tiba membengkak. Bahkan, menurut berbagai sumber terbuka, nilai proyek ini menyentuh hampir setengah triliun rupiah. Untuk apa saja dana sebesar itu digunakan? Seberapa besar porsinya yang benar-benar dirasakan rakyat? Tak ada penjelasan terbuka yang utuh.

Yang kita lihat justru ironi. Sementara Lapangan Merdeka dipoles dengan granit mahal, banyak sekolah negeri di Medan masih berlantaikan semen kasar dan WC rusak. Drainase kota tak kunjung beres. Pasar-pasar rakyat penuh genangan dan kekumuhan. Tapi Pemko Medan justru sibuk menanam tiang-tiang estetika dan membangun parkir bawah tanah di atas tanah sejarah.

Lebih menyedihkan lagi, pengawasan seolah lumpuh. Hingga kini, belum terdengar langkah serius dari Inspektorat Pemko Medan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun belum mengumumkan audit investigatif. Begitu juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang seharusnya hadir mengawal efektivitas anggaran daerah, masih diam. Bahkan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti tak merdeka dalam menjalankan fungsi penindakan.

Apakah aroma proyek ini terlalu harum bagi hukum untuk mencium baunya?

Padahal, jika rakyat biasa membangun dapur umum dari dana gotong royong tanpa nota lengkap, mereka bisa dicurigai. Tapi jika pemerintah menggelontorkan miliaran untuk taman yang mengusir rakyat, semuanya terlihat sah-sah saja. Inilah bentuk ketimpangan hukum yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menjelang peringatan 80 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI, kita justru menyaksikan pemandangan muram, hukum tidak merdeka, rakyat tidak bebas bersuara, dan anggaran publik dikelola tanpa transparansi yang sehat. Kita berteriak "merdeka!" di podium, sementara di lapangan yang seharusnya simbol kemerdekaan, hak rakyat disingkirkan dan digantikan oleh tiang-tiang komersialisasi.

Jika dugaan penyimpangan ini tidak diusut, kita sedang mengajarkan generasi muda bahwa korupsi bisa disamarkan sebagai pembangunan. Bahwa asal ada paving, mural, dan plakat, maka semua bisa dimaafkan.

Kemerdekaan bukanlah seremoni, tapi sistem yang memastikan setiap sen anggaran dipakai untuk rakyat, bukan untuk jaringan elite. Jika tak ada pengawasan, maka proyek sebesar apa pun hanyalah jubah indah yang menutupi penjarahan baru.

Lapangan Merdeka bukan milik pejabat. Ia milik sejarah dan rakyat. Maka jika ada yang bermain-main dengan proyeknya, negara wajib hadir. Jika tidak, jangan salahkan rakyat bila mereka mulai mempertanyakan untuk siapa negeri ini dibangun? Untuk siapa kemerdekaan ini dikumandangkan?(*)

Anak Amanah Tuhan

Dari Halaman 1

melainkan juga bentuk ibadah dan manifestasi dari keimanan.

Kita harus jujur: Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam memenuhi hak-hak dasar anak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, pernikahan usia dini, hingga maraknya konten digital yang merusak tumbuh kembang anak adalah potret betapa beratnya amanah yang sering kita lalaikan.

Di pedalaman, anak-anak masih harus menempuh belasan kilometer untuk mengakses pendidikan. Di perkotaan, tak sedikit anak yang tumbuh dalam tekanan akademik, kehilangan waktu bermain, bahkan jauh dari kehangatan keluarga karena orang tua sibuk mengejar nafkah. Belum lagi stunting yang masih menjadi persoalan gizi kronis yang menghambat tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Hari Anak Nasional semestinya menjadi momen muhasabah, bukan hanya seremonial. Kita perlu menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa anak bukan milik kita, tetapi titipan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Orang tua adalah madrasah pertama. Maka bagaimana bisa membentuk karakter anak yang jujur, peduli, dan religius jika lingkungan rumahnya sendiri jauh dari nilai-nilai tersebut?

Negara dan masyarakat juga wajib hadir sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak—baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan hukum. Masyarakat sipil, tokoh agama, dan lembaga pendidikan harus bersinergi membangun budaya ramah anak yang mengakar.

Kehadiran teknologi digital, meski penuh manfaat, juga menghadirkan ancaman besar jika tidak diimbangi dengan pendampingan. Banyak anak terpapar konten kekerasan, pornografi, hingga perilaku konsumtif sejak usia dini. Di sinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Bukan hanya soal memberi akses, tetapi lebih jauh tentang membentuk nilai, mendampingi, dan memberi teladan.

Sebagai amanah Tuhan, anak tak hanya perlu dipenuhi kebutuhannya secara fisik, tetapi juga harus dibimbing secara mental, moral, dan spiritual. Orang tua perlu menghadirkan waktu, bukan hanya materi. Anak tidak membutuhkan rumah besar jika hatinya sepi dari kasih sayang.

Jika kita serius ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka perhatian terhadap anak hari ini adalah prasyarat mutlak. Kita tak bisa berbicara tentang kemajuan jika generasi yang akan datang tumbuh dalam ketakutan, ketimpangan, atau kehilangan arah.

Anak-anak kita bukan hanya pemilik masa depan, mereka adalah cerminan dari siapa kita hari ini. Maka, cara terbaik menghargai Hari Anak Nasional adalah dengan sungguh-sungguh menjalankan amanah Tuhan ini. Menjadi orang tua yang sadar, masyarakat yang peduli, dan negara yang hadir.

Penutup

Anak bukan hanya "harapan bangsa", tetapi juga anugerah dan amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Semoga momentum Hari Anak Nasional ini menggugah nurani kita bersama untuk lebih serius membangun ekosistem yang sehat, ramah, dan bermartabat bagi anak-anak Indonesia.

Karena menjaga anak bukan hanya tugas negara atau keluarga, tetapi ibadah dan bukti cinta kita kepada Tuhan.